

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, Pemerintah RI telah menerbitkan PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang telah diterbitkan pada 1 September 2009 harus dilaksanakan secara total tahun 2012 (IAI, 2011<sup>a</sup>). Hasil penelitian tentang tanggapan Pemilik Modal Apotek di kota Medan terhadap PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian adalah tidak setuju (Nova Sari, 2011).

Penelitian tentang persepsi tenaga kesehatan terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Serdang Bedagai pada bulan Mei tahun 2010 menunjukkan bahwa secara umum persepsi tenaga kesehatan di Puskesmas terhadap pelayanan kefarmasian sesuai PP No.51 tahun 2009 adalah baik. Hal ini tercermin dari hasil survei bahwa 95,88% setuju dengan PP No. 51 pasal 2 tahun 2009, 65,98% setuju dengan PP No. 51 pasal 21 ayat 2, dan 68,04% setuju ditempatkannya apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas (Zulfikri, 2010).

Dengan diberlakukannya PP No. 51 tahun 2009, memberikan peluang besar bagi apoteker untuk mengembangkan ilmu kefarmasian yang dimiliki serta berkiprah lebih luas dalam pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Fakta yang tidak menguntungkan bahwa banyak farmasis tidak mencapai standar minimum yang diharapkan.

Penelitian tentang gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di apotek pada tahun 2006 di Kab. Sleman menunjukkan bahwa 63% apotek yang melaksanakan administrasi pelayanan apotek. Komponen *medication record* yakni catatan pengobatan setiap pasien

belum dilaksanakan oleh 60% apotek. Hasil wawancara menunjukkan bahwa apoteker tahu tentang makna *medication record* tetapi tidak dilaksanakan bagi setiap apotek, alasan yang disampaikan karena keterbatasan sumber daya manusia di apotek dan keterbatasan waktu apoteker di apotek. Komponen skrining resep dalam hal pertimbangan klinis yakni adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat, dll) belum dilaksanakan oleh 44% apoteker. Skrining kesesuaian farmasetik meliputi cara dan lama pemberian obat belum dilaksanakan oleh 50% apoteker (Hartini, *et al.*, 2010).

Penelitian tentang gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di apotek DKI Jakarta pada tahun 2003, menunjukkan bahwa 94,1 % apotek yang disurvei tidak melakukan dokumentasi pelayanan swamedikasi, hanya 5,9% yang melakukan dokumentasi. Dari seluruh apotek yang di survei belum ada pengisian catatan medik pasien dan hasil monitor kegiatan pelayanan KIE. 29,4% apotek yang disurvei mendatangi salinan resep, selebihnya salinan resep tidak ditandatangani oleh apoteker (Purwanti, *et al.*, 2004).

Penelitian tentang gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di apotek pada tahun 2008 di Medan menunjukkan bahwa dari seluruh apotek yang disurvei belum ada yang melaksanakan kegiatan tentang pencatatan pengobatan pasien (*medication record*), mendokumentasikan hasil monitoring penggunaan obat, mendokumentasikan kegiatan pelayanan informasi obat dan konseling. Pelayanan *Home care* dan monitoring penggunaan obat adalah kegiatan yang belum dilakukan di apotek. Kegiatan edukasi tentang swamedikasi pada masyarakat 36,76% merupakan kegiatan yang paling sedikit, kegiatan konseling 38,23%, pelaksanaan pelayanan langsung kepada pasien di apotek dilakukan oleh AA 83,82% (Ginting, 2009).

Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian diharapkan dapat ikut mendukung dan membantu terwujudnya tujuan diterbitkannya PP No. 51 tahun 2009 yaitu memberikan perlindungan kepada pasien dan

masyarakat dalam memperoleh sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Dalam menunjang terlaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, apoteker perlu menetapkan standar prosedur operasional, menerapkan standar pelayanan kefarmasian, memiliki sertifikat kompetensi profesi dan memiliki STRA. Apoteker yang STRA telah diterbitkan oleh Komite Farmasi Nasional per tanggal 17 Oktober 2011 sejumlah 5046 record dari sekitar 38.000 apoteker seluruh Indonesia (IAI, 2011<sup>a</sup>). Penelitian tentang jumlah apotek yang telah menerapkan Standar Prosedur Operasional sesuai PP No. 51 tahun 2009 belum ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan PP No. 51 tahun 2009 ditinjau dari kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Banyumas.

#### **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana penerapan PP No. 51 tahun 2009 di tinjau dari kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Banyumas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan PP No. 51 tahun 2009 di tinjau dari kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Banyumas sebagai wujud penerapan PP No. 51 tahun 2009.